

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Halmahera Tengah

1. Perkembangan Inflasi Daerah dan/atau Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting, Barang Lainnya dan Jasa Serta Risiko ke Depan

1.1. Perkembangan Inflasi Umum Triwulan II 2026

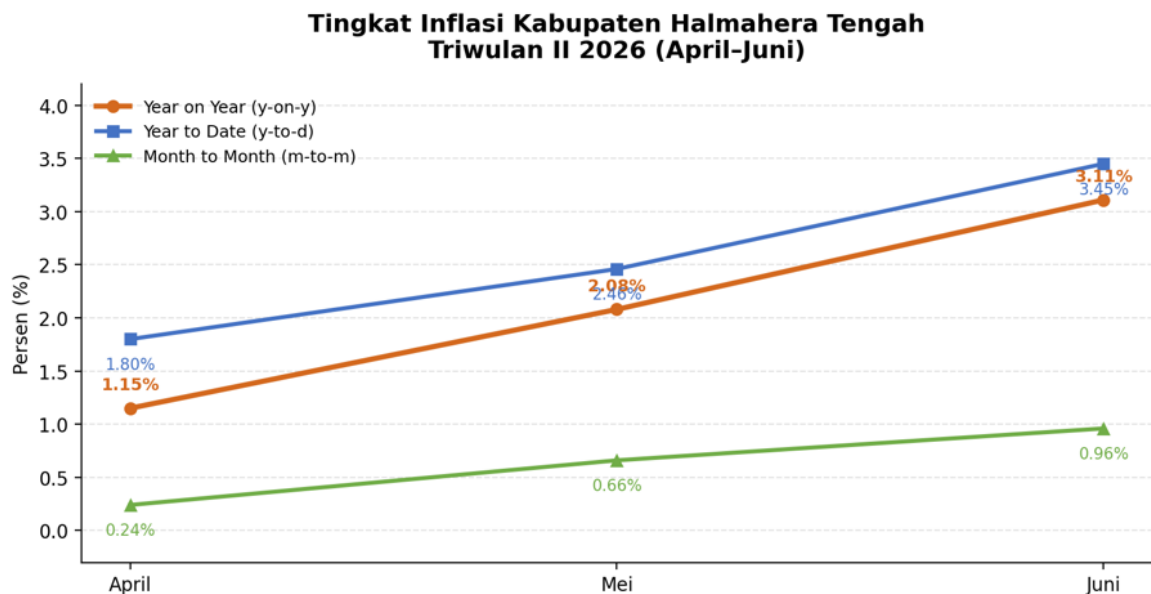
Selama Triwulan II Tahun 2026 (April-Juni), Kabupaten Halmahera Tengah mengalami tren peningkatan inflasi yang konsisten dan cukup tajam. Inflasi year on year (y-on-y) tercatat naik dari 1,15 persen pada April 2026 menjadi 2,08 persen pada Mei 2026, kemudian meningkat lebih tajam menjadi 3,11 persen pada Juni 2026 — hampir tiga kali lipat dibandingkan posisi awal triwulan. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,09 pada April menjadi 112,89 pada Juni 2026.

Pola percepatan yang sama juga tampak pada inflasi bulanan (month to month/m-to-m), yang meningkat dari 0,24 persen (April) menjadi 0,66 persen (Mei) dan 0,96 persen (Juni). Inflasi kumulatif tahun berjalan (year to date/y-to-d) hingga akhir triwulan mencapai 3,45 persen. Tren percepatan laju bulan-ke-bulan ini mengindikasikan bahwa tekanan harga tidak bersifat sesaat, melainkan terus terakumulasi sepanjang triwulan.

Bulan	IHK	Inflasi m-to-m (%)	Inflasi y-to-d (%)	Inflasi y-on-y (%)
April 2026	111,09	0,24	1,80	1,15
Mei 2026	111,82	0,66	2,08	2,08
Juni 2026	112,89	0,96	3,11	3,11

Tabel 1. Ringkasan IHK dan Tingkat Inflasi Kabupaten Halmahera Tengah, April-Juni 2026

Meski tren inflasi meningkat, posisi Kabupaten Halmahera Tengah tetap konsisten sebagai kabupaten/kota dengan inflasi y-on-y terendah di Provinsi Maluku Utara pada setiap bulan Triwulan II 2026, jauh di bawah Kota Ternate yang mencatat 2,23 persen (April), 2,98 persen (Mei), dan 5,48 persen (Juni).



Grafik 1. Tren Inflasi y-on-y, y-to-d, dan m-to-m Kabupaten Halmahera Tengah, Triwulan II 2026

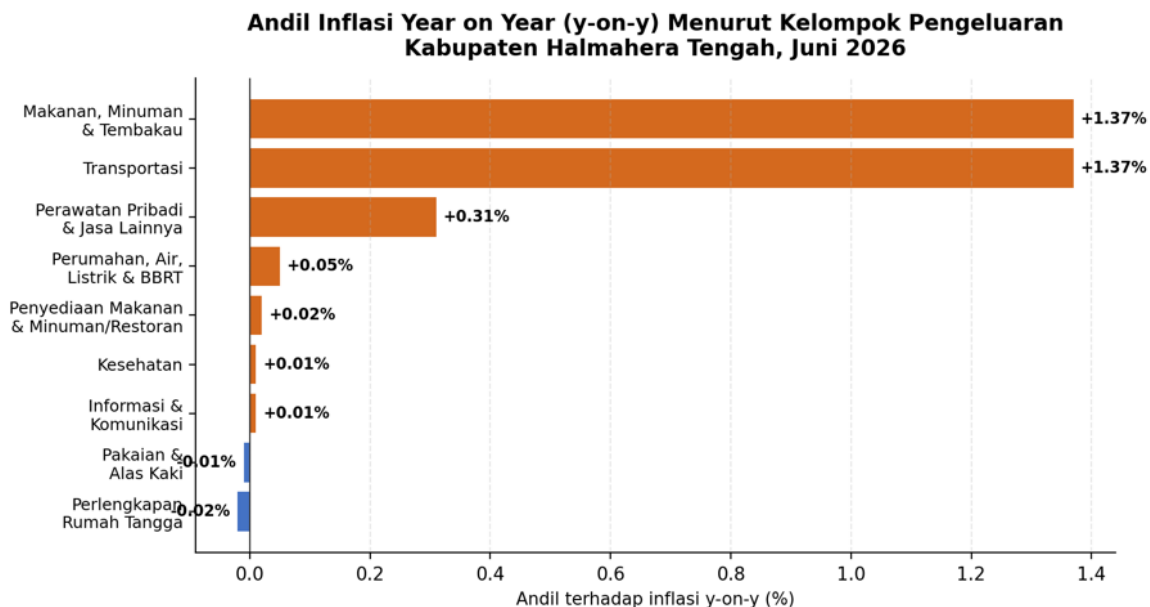
1.2. Kelompok Pengeluaran Pendorong Utama

Kenaikan inflasi pada Triwulan II 2026 didorong terutama oleh kelompok transportasi, yang mengalami lonjakan y-on-y paling ekstrem dari seluruh kelompok pengeluaran: dari 1,62 persen pada April, melonjak menjadi 6,65 persen pada Mei, dan mencapai 14,33 persen pada Juni 2026. Lonjakan ini terutama berasal dari subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi, yang naik dari 2,43 persen (April) menjadi 21,07 persen (Juni) y-on-y, didorong oleh kenaikan harga solar dan bensin. Pada Juni 2026 saja, kelompok transportasi memberikan andil 1,37 persen terhadap inflasi y-on-y — setara dengan andil kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga menjadi pendorong signifikan sepanjang triwulan, dengan inflasi y-on-y stabil tinggi di kisaran 4,19–4,50 persen, terutama disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut memberi tekanan konsisten pada kisaran 3,11–3,98 persen y-on-y, dengan komoditas utama seperti ikan cakalang/ikan sisik, beras, bawang merah, minyak goreng, dan cabai rawit.

Kelompok Pengeluaran	y-on-y April (%)	y-on-y Mei (%)	y-on-y Juni (%)
Transportasi	1,62	6,65	14,33
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,19	4,50	4,41
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,11	3,98	3,25
Kesehatan	0,53	0,53	0,53
Perumahan, Air, Listrik, dan BBRT	0,14	0,25	0,31
Pendidikan	-54,38	-54,38	0,00

Tabel 2. Inflasi y-on-y Kelompok Pengeluaran Terpilih, April-Juni 2026



Grafik 2. Andil Inflasi y-on-y Menurut Kelompok Pengeluaran, Juni 2026

1.3. Komoditas Dominan Penyumbang Inflasi dan Deflasi

Komoditas yang secara konsisten menjadi penyumbang utama inflasi sepanjang Triwulan II 2026 antara lain: solar dan bensin (kelompok transportasi); ikan cakalang/ikan sisik, beras, bawang merah, minyak goreng, dan cabai rawit (kelompok makanan); serta emas perhiasan (kelompok perawatan pribadi). Kenaikan harga BBM jenis solar dan bensin menjadi faktor paling dominan pada Mei dan Juni 2026, seiring makin besarnya andil kelompok transportasi terhadap inflasi umum.

Di sisi lain, sejumlah komoditas perikanan tangkap justru menjadi penahan laju inflasi (deflasi) pada beberapa bulan, seperti ikan malalugis/ikan sorihi, ikan selar/ikan tude, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu. Pola yang berubah-ubah ini — di mana jenis ikan tertentu kadang menjadi penyumbang inflasi dan kadang deflasi antarbulan — mencerminkan fluktuasi hasil tangkapan nelayan yang dipengaruhi musim dan cuaca. Komoditas hortikultura seperti bawang putih, tahu, dan tempe juga tercatat memberi andil deflasi pada sejumlah bulan.

1.4. Risiko ke Depan

- **Risiko harga energi/BBM:** Kelompok transportasi menunjukkan percepatan paling tajam dan konsisten sepanjang triwulan (andil m-to-m transportasi pada Juni 2026 mencapai 0,62 persen, tertinggi dari seluruh kelompok). Jika tren kenaikan harga solar dan bensin berlanjut pada Triwulan III, kelompok ini berpotensi tetap menjadi pendorong utama inflasi ke depan.

- **Risiko volatilitas pangan protein (perikanan tangkap):** Pola inflasi/deflasi ikan tangkap yang berganti-ganti tiap bulan menunjukkan pasokan yang rentan terhadap musim dan cuaca. Gangguan cuaca ekstrem atau musim paceklik tangkap berpotensi memicu lonjakan harga ikan secara tiba-tiba.

- **Risiko akumulasi tekanan bulanan:** Inflasi m-to-m yang terus berakselerasi dari 0,24 persen (April) menjadi 0,96 persen (Juni) mengindikasikan pola percepatan, bukan sekadar fluktuasi acak. Apabila pola ini berlanjut ke Triwulan III, inflasi y-on-y berisiko menembus level yang lebih tinggi lagi.

- **Risiko harga emas dan barang bernilai tinggi:** Kenaikan harga emas perhiasan yang konsisten turut menekan daya beli kelompok perawatan pribadi dan berpotensi terus berlanjut mengingat harga emas global yang fluktuatif.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa posisi inflasi Kabupaten Halmahera Tengah masih menjadi yang terendah di Provinsi Maluku Utara pada seluruh bulan Triwulan II 2026, sehingga tekanan inflasi daerah secara relatif masih dapat dikendalikan dibandingkan wilayah

lain, meskipun tren peningkatannya perlu terus diwaspadai dan direspons melalui langkah-langkah pengendalian yang akan dibahas pada poin berikutnya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2026

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah

Selama Triwulan II 2026 (April-Juni), Kabupaten Halmahera Tengah mengalami tren inflasi year on year (y-on-y) yang terus meningkat secara konsisten dari bulan ke bulan, yaitu dari 1,15 persen pada April 2026, naik menjadi 2,08 persen pada Mei 2026, dan mencapai 3,11 persen pada Juni 2026. Peningkatan yang progresif ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi struktural yang perlu mendapat perhatian TPID, bukan sekadar fluktuasi harga musiman semata. Berdasarkan data BPS, teridentifikasi beberapa permasalahan pokok pengendalian inflasi sebagai berikut.

a. Lonjakan harga bahan bakar minyak (solar dan bensin) pada kelompok transportasi

Permasalahan paling signifikan adalah melonjaknya inflasi kelompok transportasi, yang meningkat tajam dari 1,62 persen (April) menjadi 6,65 persen (Mei), kemudian melonjak menjadi 14,33 persen (Juni) secara y-on-y. Andil kelompok ini terhadap inflasi umum turut melonjak dari 0,16 persen menjadi 1,37 persen dalam tiga bulan, setara dengan andil kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Juni 2026. Kenaikan ini didominasi oleh komoditas bensin (andil 0,78 persen pada Juni) dan solar (andil 0,54 persen pada Juni), yang tercermin pada subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi yang inflasinya melonjak dari 2,43 persen (April) menjadi 21,07 persen (Juni) secara y-on-y. Penyebabnya diduga terkait penyesuaian harga BBM serta tingginya biaya distribusi BBM ke wilayah kepulauan Halmahera Tengah.

b. Fluktuasi harga hasil laut yang tinggi antarbulan

Komoditas perikanan seperti ikan cakalang/ikan sisik, ikan asap, ikan selar/ikan tude, dan ikan malalugis/ikan sorihi secara konsisten muncul sebagai penyumbang utama inflasi y-on-y kelompok makanan, namun pada saat yang sama kerap menjadi penyumbang deflasi secara month to month (m-to-m). Pola ini menunjukkan volatilitas harga yang tinggi akibat ketergantungan pasokan pada musim tangkap dan kondisi cuaca/gelombang laut, sehingga harga ikan sulit diprediksi dan rentan terhadap gangguan pasokan jangka pendek.

c. Kenaikan harga bumbu dapur dan minyak goreng pada Juni 2026

Pada Juni 2026 terjadi kenaikan signifikan pada komoditas bawang merah (andil 0,36 persen), minyak goreng (andil 0,30 persen), dan cabai rawit (andil 0,21 persen) terhadap inflasi y-on-y kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ketiga komoditas ini juga menjadi penyumbang utama inflasi m-to-m pada Juni 2026. Karena bawang merah dan cabai umumnya dipasok dari luar Kabupaten Halmahera Tengah, kenaikan harga ini mengindikasikan adanya gangguan

pada rantai distribusi antarpulau/antardaerah.

d. Tren kenaikan harga emas perhiasan yang konsisten

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi y-on-y tertinggi secara konsisten sepanjang triwulan (4,19 persen di April, 4,50 persen di Mei, 4,41 persen di Juni), yang hampir seluruhnya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan (andil sekitar 0,24-0,25 persen setiap bulan). Kenaikan ini bersumber dari tren harga emas global dan berada di luar jangkauan kendali kebijakan pengendalian inflasi daerah secara langsung.

e. Ketergantungan pasokan bahan pokok dari luar daerah

Komoditas beras dan gula pasir turut tercatat sebagai penyumbang inflasi maupun deflasi yang berfluktuasi pada beberapa bulan, mengindikasikan bahwa pasokan bahan pokok strategis di Kabupaten Halmahera Tengah masih sangat bergantung pada distribusi dari luar daerah melalui jalur laut, sehingga rentan terhadap gangguan cuaca dan keterlambatan pengiriman.

Ringkasan komoditas dan kelompok pengeluaran dominan per bulan disajikan pada tabel berikut.

Bulan	Kelompok pengeluaran dominan	Inflasi y-on-y kelompok	Komoditas utama pendorong
April 2026	Perawatan pribadi & jasa lainnya	4,19%	Emas perhiasan
	Makanan, minuman & tembakau	3,11%	Ikan cakalang, beras, ikan malalugis
Mei 2026	Transportasi	6,65%	Solar (andil 0,67%)
	Perawatan pribadi & jasa lainnya	4,50%	Emas perhiasan
Juni 2026	Transportasi	14,33%	Bensin (andil 0,78%), solar (andil 0,54%)
	Makanan, minuman & tembakau	3,25%	Bawang merah, minyak goreng, cabai rawit

Secara umum, permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Halmahera Tengah pada Triwulan II 2026 terpusat pada dua faktor utama, yaitu: (1) kenaikan harga BBM yang berdampak luas pada biaya transportasi dan distribusi barang, serta (2) volatilitas harga pangan strategis (ikan, bumbu dapur, minyak goreng) akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah dan faktor cuaca. Kedua faktor ini perlu menjadi fokus utama kebijakan pengendalian inflasi TPID pada triwulan berikutnya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2026

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

3. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pengendalian inflasi pada Triwulan II 2026, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) beserta seluruh Perangkat Daerah (OPD) anggota telah melaksanakan serangkaian kebijakan dan kegiatan konkret sepanjang bulan April sampai dengan Juni 2026. Kebijakan yang dilaksanakan disusun secara langsung untuk merespons lima permasalahan pokok yang teridentifikasi, yaitu: (a) lonjakan harga BBM (solar dan bensin) pada kelompok transportasi; (b) fluktuasi harga hasil laut antarbulan; (c) kenaikan harga bumbu dapur dan minyak goreng; (d) tren kenaikan harga emas perhiasan; serta (e) ketergantungan pasokan bahan pokok dari luar daerah. Uraian kebijakan per permasalahan disajikan sebagai berikut.

3.1. Kebijakan Penanganan Lonjakan Harga BBM pada Kelompok Transportasi

Merespons melonjaknya inflasi kelompok transportasi dari 1,62 persen (April) menjadi 14,33 persen (Juni) yang didominasi oleh komoditas bensin dan solar, Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (ESDA) Sekretariat Daerah melaksanakan kebijakan pengawasan langsung terhadap kepatuhan harga BBM non-subsidi di tingkat pengecer.

Bagian Ekonomi dan SDA – Penertiban dan Pengawasan HET BBM di Pengecer pada 28 Juni 2026 di Kecamatan Weda, Weda Tengah, dan Weda Selatan. Tim Bagian Ekonomi dan SDA melakukan penertiban terhadap pengecer penjual BBM non-subsidi (Pertamax dan Dexlite) yang menjual dengan harga tidak sesuai Surat Edaran Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditandatangani Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. Kebijakan ini bertujuan menekan penyimpangan harga BBM di lini pengecer sebagai salah satu sumber tekanan biaya distribusi dan transportasi di wilayah kepulauan.

3.2. Kebijakan Penanganan Fluktuasi Harga Hasil Laut

Untuk merespons tingginya volatilitas harga komoditas perikanan (ikan cakalang/ikan sisik, ikan asap, ikan selar/ikan tude, dan ikan malalugis/ikan sorihi) yang dipengaruhi musim tangkap dan cuaca, Dinas Perikanan melaksanakan kebijakan penguatan akses masyarakat terhadap hasil laut sekaligus menjaga daya beli kelompok rentan.

Dinas Perikanan – Pembagian Ikan Segar bagi Masyarakat Kurang Mampu pada tanggal 26 Mei 2026 Kecamatan Weda Kegiatan diikuti oleh 120 penerima bantuan dari 4 desa (Desa Were 40 penerima, Fidi Jaya 30 penerima, Nurweda 30 penerima, dan Wedana 20 penerima). Kebijakan ini merupakan langkah mitigasi dampak fluktuasi harga ikan terhadap daya beli masyarakat kurang mampu, sekaligus bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan protein hewani di tengah pola harga yang tidak menentu antarbulan.

3.3. Kebijakan Penanganan Kenaikan Harga Bumbu Dapur dan Minyak Goreng

Menghadapi kenaikan signifikan harga bawang merah, minyak goreng, dan cabai rawit pada Juni 2026 yang bersumber dari gangguan rantai distribusi antarpulau, TPID melaksanakan kombinasi kebijakan pemantauan pasar langsung, penyaluran bahan pangan pokok, serta pengembangan produksi lokal komoditas bumbu dapur.

1. TPID Halmahera Tengah – Sidak Pasar pada tanggal 7 Mei 2026 di Kota Weda Sidak pasar dalam rangka menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok bahan pokok menjelang HBKN Idul Adha, dipimpin Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Kejaksaan Negeri Weda, Dandim 1512 Weda, Kapolsek Weda, Kepala BPS Halmahera Tengah, dan anggota TPID lingkup Pemda. Hasil pemantauan: sebagian besar komoditas masih di atas HET/HAP namun perkembangan harga dari minggu ke-4 April hingga minggu pertama Mei 2026 relatif stabil tanpa kenaikan signifikan.

2. TPID Halmahera Tengah – Sidak Pasar pada tanggal 23 Mei 2026 di Kota Weda Sidak pasar berdasarkan Surat Undangan Nomor 500.3.11/220/2026 tanggal 23 Mei 2026, dalam rangka pengendalian inflasi, pemantauan stabilitas harga, dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang HBKN Iduladha 1447 H/2026 M. Hasil sidak mengidentifikasi cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, dan LPG sebagai komoditas strategis yang berpotensi naik akibat keterbatasan pasokan, tingginya biaya distribusi, serta lonjakan permintaan.

3. Dinas Ketahanan Pangan – Penyaluran Komoditas/Bahan Pangan pada Lembaga Jaringan Distribusi Pangan pada tanggal 30 Juni 2026 di Kecamatan Weda Tengah, Weda Timur, Patani, dan Patani Timur Penyaluran bahan pangan pokok berupa beras, gula, minyak goreng, dan telur melalui lembaga jaringan distribusi pangan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen pada empat kecamatan.

4. Dinas Pertanian – Pengembangan Budidaya Cabai pada 1 April 2026 di SP 2 Trans Wale, Kecamatan Weda Utara Pengembangan budidaya cabai pada lahan seluas 8 hektare menggunakan benih unggul dengan pendampingan intensif penyuluh pertanian, target produksi 75 ton cabai segar per musim tanam. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pasokan cabai lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan antarpulau yang menjadi pemicu utama gejolak harga cabai rawit.

3.4. Kebijakan Terkait Tren Kenaikan Harga Emas Perhiasan

Sebagaimana teridentifikasi, kenaikan harga emas perhiasan bersumber dari tren harga emas global dan berada di luar jangkauan kendali kebijakan pengendalian inflasi daerah secara langsung. Oleh karena itu, pada Triwulan II 2026 TPID tidak melaksanakan kebijakan intervensi harga khusus untuk komoditas ini, namun tetap memantau perkembangannya melalui forum High Level Meeting (HLM) TPID sebagai bagian dari evaluasi inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya secara keseluruhan.

3.5. Kebijakan Penguatan Ketahanan Pasokan Bahan Pokok dari Dalam Daerah

Untuk mengurangi ketergantungan pasokan bahan pokok strategis (beras, sayuran, buah-buahan, dan komoditas perkebunan) dari luar daerah yang rentan terhadap gangguan cuaca dan keterlambatan distribusi laut, Dinas Pertanian melaksanakan serangkaian kebijakan penguatan produksi pangan lokal, didukung oleh koordinasi lintas sektor melalui High Level Meeting TPID.

1. TPID Halmahera Tengah – High Level Meeting (HLM) pada tanggal 17 Juni 2026 di Kantor Bupati Halmahera Tengah Forum koordinasi lintas sektor dihadiri Forkopimda, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten Halmahera Tengah, Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara, KUPP Weda, instansi vertikal, Perangkat Daerah anggota TPID, Direktur Perusda Fagogoru Maju Bersama, pelaku usaha, distributor, dan pemangku kepentingan terkait, guna mensinkronkan kebijakan pengendalian inflasi lintas sektor termasuk penguatan distribusi dan produksi pangan daerah.

2 Dinas Pertanian – Panen Jagung Bersama pada tanggal 20 April 2026, di Kecamatan Weda Panen jagung bersama kelompok tani dalam rangka meningkatkan produksi jagung dan komoditas lain guna memperkuat ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

3. Dinas Pertanian – Pengolahan dan Optimalisasi Lahan Sawah pada tanggal 2 Juni 2026 di

Wairoro, Kecamatan Weda Selatan Pengolahan lahan sawah mencapai 50 hektare dari target 150 hektare, melibatkan 32 anggota kelompok tani, sebagai bagian dari program optimalisasi lahan untuk mendukung produksi beras lokal.

4. Dinas Pertanian – Penyaluran Benih Padi pada tanggal 10 Juni 2026 di Wairoro, Kecamatan Weda Selatan Penyaluran 2 ton benih padi unggul kepada kelompok tani untuk mendukung optimalisasi lahan sawah, guna mencukupi ketersediaan beras sebagai bahan pokok utama dan menjaga stabilitas harganya.

5. Dinas Pertanian – Identifikasi Lahan untuk Tanaman Sayuran pada 17 April 2026 di Kecamatan Patani Identifikasi lahan petani seluas ± 20 hektare untuk pengembangan komoditas sayuran, sebagai dasar perencanaan penanaman berkelanjutan guna mencegah kelangkaan pasokan sayuran yang memicu kenaikan harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2026

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

4. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Bagian ini menyajikan evaluasi atas dampak dan keefektifan kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2026 sebagaimana telah diuraikan pada Poin 5, yaitu: (1) pengembangan budidaya cabai (1 April 2026); (2) identifikasi lahan untuk tanaman sayuran (17 April 2026); (3) sidak pasar tahap I (7 Mei 2026); dan (4) sidak pasar tahap II (23 Mei 2026). Evaluasi dilakukan dengan membandingkan data Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kabupaten Halmahera Tengah pada bulan pelaksanaan kebijakan dengan bulan-bulan berikutnya, untuk melihat apakah kebijakan tersebut berdampak nyata terhadap pergerakan harga komoditas yang menjadi sasarannya.

4.1. Evaluasi Kebijakan Bulan April 2026

4.1.1. Pengembangan Budidaya Cabai (Dinas Pertanian, 1 April 2026)

Kebijakan ini berupa pengembangan budidaya cabai pada lahan seluas 8 hektare di SP 2 Trans Wale, Kecamatan Weda Utara, dengan target produksi 75 ton cabai segar per musim tanam, sebagai respons atas ketergantungan pasokan cabai dari luar daerah.

Indikator	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
Andil inflasi y-on-y cabai rawit	-0,07%	-0,32%	+0,21%
Status	Deflasi	Deflasi	Inflasi

Evaluasi dampak: Mengingat masa tanam hingga panen cabai umumnya berkisar 75-90 hari, realisasi produksi dari kebijakan ini secara teknis belum dapat dipanen dan masuk pasar pada periode April-Mei 2026. Hal ini konsisten dengan data BPS yang menunjukkan cabai rawit masih mengalami deflasi pada April (-0,07%) dan bahkan deflasi yang lebih dalam pada Mei (-0,32%), yang lebih dipengaruhi oleh faktor musiman dan bukan oleh hasil program ini. Pada Juni 2026, justru terjadi pembalikan menjadi inflasi (+0,21%) dan cabai rawit menjadi salah satu komoditas dengan andil inflasi m-to-m tertinggi (0,40%), yang mengindikasikan bahwa pasokan dari program budidaya lokal belum mencukupi untuk meredam tekanan permintaan menjelang pertengahan tahun.

4.1.2. Identifikasi Lahan untuk Tanaman Sayuran (Dinas Pertanian, 17 April 2026)

Kebijakan berupa identifikasi lahan petani seluas ± 20 hektare di Kecamatan Patani untuk pengembangan komoditas sayuran, sebagai dasar perencanaan penanaman berkelanjutan.

Indikator	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
Andil inflasi y-on-y ketimun	+0,03%	+0,04%	+0,06%
Andil inflasi y-on-y sawi hijau	n/a	n/a	+0,03%
Andil inflasi y-on-y bayam	+0,02%	n/a	+0,04%

Evaluasi dampak: Kegiatan pada 17 April 2026 baru merupakan tahap identifikasi/pemetaan lahan, belum sampai pada tahap realisasi tanam maupun panen, sehingga secara logis belum dapat menghasilkan dampak langsung terhadap harga pada April-Mei 2026. Data BPS justru menunjukkan tren sebaliknya: komoditas sayuran (ketimun, bayam, sawi hijau) menunjukkan tren andil inflasi yang terus meningkat dari April hingga Juni 2026, menandakan tekanan harga pada kelompok sayuran belum tertangani.

4.2. Evaluasi Kebijakan Bulan Mei 2026

4.2.1. Sidak Pasar Tahap I (TPID, 7 Mei 2026)

Sidak pasar dilaksanakan di Kota Weda dalam rangka menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok bahan pokok menjelang HBKN Idul Adha, dipimpin Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama unsur Forkopimda dan BPS. Hasil pemantauan menyatakan sebagian besar komoditas masih di atas HET/HAP, namun perkembangan harga dari minggu ke-4 April hingga minggu pertama Mei 2026 relatif stabil.

Indikator	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
Inflasi m-to-m (umum)	0,24%	0,66%	0,96%
Inflasi y-on-y (umum)	1,15%	2,08%	3,11%

Evaluasi dampak: Setelah pelaksanaan sidak pasar tahap I, laju inflasi bulanan (m-to-m) justru meningkat dari 0,24 persen (April) menjadi 0,66 persen (Mei), dan inflasi y-on-y naik dari 1,15 persen menjadi 2,08 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh kelompok transportasi (andil naik dari 0,16% menjadi 0,64%, akibat solar) yang berada di luar cakupan komoditas pangan yang disasar sidak pasar. Sidak pasar 7 Mei 2026 bersifat pemantauan dan deteksi dini (tanpa disertai instrumen intervensi harga seperti operasi pasar atau subsidi ongkos angkut), sehingga tidak dirancang untuk menekan laju inflasi secara langsung, melainkan untuk memastikan ketersediaan stok menjelang HBKN.

4.2.2. Sidak Pasar Tahap II (TPID, 23 Mei 2026)

Sidak pasar dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Nomor 500.3.11/220/2026, dalam rangka pengendalian inflasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang HBKN Iduladha 1447 H/2026 M. Hasil sidak mengidentifikasi cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, dan LPG sebagai komoditas strategis yang berpotensi naik akibat keterbatasan pasokan, tingginya biaya distribusi, serta lonjakan permintaan.

Indikator	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
Andil inflasi y-on-y cabai rawit	+0,07%	-0,32%	+0,21%
Andil inflasi y-on-y minyak goreng	-0,06%	+0,05%	+0,30%
elur ayam ras / LPG	tidak dominan	tidak dominan	tidak dominan

Evaluasi dampak: Prediksi hasil sidak pasar tahap II terbukti akurat untuk 2 dari 4 komoditas yang diidentifikasi. Cabai rawit yang semula deflasi (-0,32% pada Mei) berbalik menjadi inflasi

signifikan (+0,21%) pada Juni dan menjadi salah satu pendorong utama inflasi m-to-m (andil 0,40%, tertinggi di antara seluruh komoditas). Minyak goreng juga terbukti naik dari deflasi/stagnan menjadi inflasi 0,30 persen pada Juni, andil tertinggi kedua setelah bawang merah. Adapun telur ayam ras dan LPG tidak terkonfirmasi menjadi komoditas dominan pendorong inflasi pada BRS BPS Juni 2026, sehingga prediksi untuk kedua komoditas tersebut belum terbukti dalam data resmi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2026

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

5. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan pada Triwulan II 2026, disusun rekomendasi perbaikan dan peningkatan kebijakan pengendalian inflasi untuk ditindaklanjuti oleh TPID dan OPD terkait pada Triwulan III 2026. Rekomendasi disusun berdasarkan dua kategori: (1) perbaikan atas kebijakan yang telah dilaksanakan namun belum optimal; dan (2) usulan kebijakan baru untuk permasalahan yang pada Triwulan II 2026 belum memiliki kebijakan penanganan yang memadai.

5.1. Rekomendasi Perbaikan atas Kebijakan Produksi Pangan Lokal

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan budidaya cabai dan identifikasi lahan sayuran masih berada pada tahap awal (tanam/perencanaan) sehingga belum berdampak terhadap harga pada Triwulan II 2026. Berikut rekomendasi percepatan agar dampaknya dapat terealisasi pada Triwulan III 2026:

- Mempercepat tindak lanjut hasil identifikasi lahan sayuran seluas ± 20 hektare di Kecamatan Patani (17 April 2026) ke tahap penyaluran benih/bibit dan realisasi tanam paling lambat awal Triwulan III 2026, mengingat komoditas sayuran (ketimun, bayam, sawi hijau) menunjukkan tren inflasi yang terus meningkat.
- Memantau secara berkala progres panen budidaya cabai 8 hektare di SP 2 Trans Wale (target panen sekitar Juli 2026) untuk memastikan realisasi produksi 75 ton sesuai target, serta menyiapkan skema penyerapan/distribusi hasil panen agar langsung dapat menekan harga cabai rawit di pasar.
- Mereplikasi pola budidaya cabai dan sayuran pada kecamatan lain yang memiliki kondisi lahan serupa, mengingat cabai rawit dan komoditas sayuran secara konsisten menjadi penyumbang inflasi/deflasi bulanan (m-to-m) tertinggi sepanjang Triwulan II 2026.

5.2. Rekomendasi Penguatan Sidak Pasar dengan Tindak Lanjut Intervensi

Evaluasi menunjukkan sidak pasar (7 Mei dan 23 Mei 2026) efektif sebagai instrumen deteksi dini namun belum efektif mencegah realisasi kenaikan harga karena tidak disertai tindakan intervensi lanjutan. Direkomendasikan:

- Menindaklanjuti setiap temuan sidak pasar dengan operasi pasar murah/pasar penyeimbang untuk komoditas yang teridentifikasi berpotensi naik, khususnya cabai rawit dan minyak goreng yang terbukti akurat diprediksi pada sidak 23 Mei 2026.
- Menjajaki kerja sama dengan distributor/agen bahan pokok dan Perusda Fagogoru Maju Bersama untuk fasilitasi distribusi dan subsidi ongkos angkut komoditas strategis dari luar

daerah, guna menekan biaya distribusi yang menjadi salah satu akar penyebab kenaikan harga.

- Meningkatkan frekuensi sidak pasar dari sebelumnya 2 kali per triwulan menjadi minimal 1 kali per bulan, dengan cakupan tidak hanya di Kota Weda namun diperluas ke kecamatan lain, khususnya kecamatan kepulauan yang bergantung pada distribusi laut.
- Menyusun mekanisme pelaporan hasil sidak pasar secara berjenjang kepada TPID agar dapat segera ditindaklanjuti dengan kebijakan intervensi, tidak hanya berhenti pada tahap pemantauan dan pencatatan.

5.3. Rekomendasi Penguatan Pengendalian Harga BBM dan Biaya Transportasi

Mengingat kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada Juni 2026 (14,33 persen y-on-y, andil 1,37 persen), sementara kebijakan penertiban HET BBM baru dilaksanakan sekali pada akhir triwulan (28 Juni 2026), direkomendasikan:

- Menjadikan penertiban dan pengawasan HET BBM non-subsidi sebagai kegiatan rutin bulanan oleh Bagian Ekonomi dan SDA, tidak hanya dilaksanakan menjelang akhir triwulan.
- Mengevaluasi dan mengusulkan skema subsidi ongkos distribusi BBM ke wilayah kepulauan Halmahera Tengah kepada Pemerintah Provinsi/Pusat, mengingat tingginya biaya distribusi menjadi penyebab struktural kenaikan harga BBM di tingkat pengecer.
- Melakukan koordinasi dengan Pertamina/agen resmi penyalur BBM untuk memastikan pasokan BBM bersubsidi mencukupi kebutuhan masyarakat, guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM non-subsidi yang harganya lebih fluktuatif.

5.4. Rekomendasi untuk Permasalahan yang Belum Memiliki Kebijakan Penanganan

Sebagaimana diuraikan, terdapat permasalahan hasil identifikasi pada Triwulan II 2026 belum memiliki kebijakan penanganan yang secara langsung menyasar stabilisasi harga. Rekomendasi untuk permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Fluktuasi harga hasil laut: TPID perlu menyusun kebijakan yang secara khusus menyasar stabilisasi harga ikan (bukan sekadar bantuan sosial), misalnya melalui fasilitasi cold storage/gudang pendingin di tingkat desa nelayan untuk menyerap hasil tangkapan pada saat panen raya dan mendistribusikannya pada saat paceklik, sehingga fluktuasi harga antarbulan dapat diredam.
- Ketergantungan pasokan dari luar daerah: mempercepat realisasi seluruh program penguatan produksi lokal yang telah dirintis Dinas Pertanian (optimalisasi lahan sawah, penyaluran benih padi) dan mengintegrasikannya dengan perbaikan infrastruktur distribusi (jalan produksi, dermaga/pelabuhan rakyat) agar hasil produksi lokal dapat menjangkau pasar secara efisien.
- Tren kenaikan harga emas perhiasan: karena bersumber dari tren harga emas global dan di luar kendali kebijakan daerah, TPID cukup melanjutkan pemantauan melalui forum HLM tanpa perlu kebijakan intervensi harga, namun perlu dicantumkan sebagai catatan khusus (bukan target pengendalian) pada laporan triwulan berikutnya agar tidak menimbulkan ekspektasi keliru bahwa TPID dapat mengendalikannya.

5.5. Rekomendasi Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

- Menjadwalkan Rapat koordinasi dan/atau Rapat Internal TPID secara rutin minimal 1 kali per bulan, agar evaluasi dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan lebih responsif terhadap dinamika harga bulanan.
- Membangun sistem informasi harga pangan strategis (papan informasi harga/aplikasi sederhana) yang dapat diakses publik dan diperbarui mingguan, sebagai basis data pendukung bagi laporan triwulan berikutnya sekaligus alat deteksi dini bagi TPID.
- Menetapkan indikator keberhasilan (target penurunan inflasi y-on-y) yang jelas untuk

Triwulan III 2026 sebagai acuan evaluasi kinerja seluruh kebijakan yang direkomendasikan di atas.